Standar 6. Pendanaan

Reputasi ITB dan integritas *civitas* ITB merupakan keunggulan kompetitif utama ITB yang patut dibanggakan dan perlu terus dijaga dan ditingkatkan dengan kerja keras oleh seluruh komunitas ITB. Pencapaian prestasi ITB harus diraih melalui integritas dan berlandaskan kepada perilaku/etos kerja yang baik dan bertanggungjawab. Oleh karenanya ITB sangat menyadari perlunya memperbaharui budaya kerja dan nilai-nilai etika individu yang akan menjadi tumpuan dalam merealisasikan program kerja dan menjadi dasar bagi implementasi kebijakan dan peraturan ITB. Dalam menjalankan *clean and good university governance*, akuntabilitas menjadi salah satu prinsip terpenting, di samping tiga prinsip penting lainnya, yaitu: *transparancy, responsibility, and fairness*. Secara bertahap, keempat prinsip ini telah melandasi penyelenggaraan manajemen ITB sesuai dengan tanggung-jawabnya.

ITB menyadari bahwa kondisi ITB yang akuntabel hanya akan dapat diraih jika ada komitmen yang tinggi dari seluruh komunitas yang terkait, sebagai prasyarat mutlak, yaitu dosen dan pegawai non-dosen – tanpa kecuali. Untuk dapat meraih kondisi akuntabel tersebut salah satu hal yang mendasar adalah adanya dukungan terjadinya perubahan budaya kerja dari komunitas ITB, mulai dari jajaran pimpinan hingga staf paling bawah demi terciptanya etos kerja yang terstruktur. Kondisi ITB yang akuntabel menuntut pula adanya Sistem Manajemen, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Metode Pengukuran Kinerja yang disepakati dan diimplementasikan secara konsisten. Target mutu (tahunan) adalah merupakan salah satu bagian dari *roadmap* untuk menuju kondisi *clean dan good university governance* di atas.

Sistem akuntansi keuangan yang dilaksanakan ITB BHMN menganut *dual system*, yaitu Akuntansi Keuangan (*Financail Accounting*) dan Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*). Hal ini dilaksanakan karena belum adanya peraturan maupun pedoman resmi dari pemerintah mengenai kewajiban akuntansi dan pelaporan dengan satu sistem yang dibakukan untuk perguruan tinggi berbentuk Badan Hukum Milik Negara. Untuk tujuan pelaporan keuangan ITB-BHMN sebagai organisasi nirlaba, mulai tahun 2003 proses akuntansi dan pelaporan telah menggunakan Standard Akuntansi Keuangan Nomor 45 sebagai prinsip pelaporan keuangan. Dalam kerangka ITB BHMN ini, kegiatan operasional bidang keuangan tersebut dijalankan oleh Direktorat Keuangan yang berada dalam lingkup kerja Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya. Fungsi Direktorat Keuangan ini adalah menjalankan kegiatan penganggaran, perbendaharaan, *monitoring* dan pengendalian implementasi anggaran, serta evaluasi kinerja keuangan ITB BHMN.

6.1. Akuntabilitas

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB merupakan penjabaran rencana strategik ITB dalam bentuk rencana kerja dan anggaran ITB yang disusun untuk setiap tahun

anggaran. Selain sebagai acuan dalam pengendalian kegiatan dan anggaran, RKA ITB merupakan tahapan berkesinambungan dari upaya untuk mewujudkan visi ITB menjadi universitas berbasis riset pada tahun 2010. Oleh karenanya, RKA ITB memiliki siklus tahunan yang mencakup tahapan: (1) penyusunan RKA, (2) implementasi, (3) revisi untuk tahun anggaran berjalan, dan (4) pemanatuan, evaluasi dan perbaikan/ pengembangan.

Dalam penyusunan, implementasi umum dan evaluasi RKA, Rektor ITB perlu:

- Menjamin sistem administrasi umum dan keuangan ITB sebagai entitas hukum;
- Menjamin keberlangsungan operasional ITB;
- Mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya untuk penyelenggaraan program kegiatan ITB secara menyeluruh.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang layak audit (*auditable*) dan akuntabel serta untuk menciptakan pengendalian yang baik atas seluruh asset dan kinerja keuangan ITB, maka dirancang Sistem Keuangan (Siskeu) dan berbagai alat ukur yang berbasis kegiatan (*Activity – Based Costing*). Untuk itu telah ditetapkan jenis kegiatan dan sumber pendanaan (*resources*) sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan (*Instruction*)
2. Kegiatan Penelitian (*Research*)
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (*Public Service*)
4. Kegiatan Pendukung Akademik (*Academic Support*)
5. Kegiatan Layanan Kepada Mahasiswa (*Student Support*)
6. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance*)
7. Kegiatan Administrasi dan Umum (*Institutional Support*)
8. Kegiatan Beasiswa (*Scholarship/Fellowship*)
9. Kegiatan Kemitraan dan *Auxialiary Ventures*

Sumber penerimaan (*resources*) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan berasal dari:

1. *Sumber Dana Pemerintah (DIPA)*
2. *Sumber Dana Masyarakat:*
    a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)
    b. Sumbangan Beasiswa

c. Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat

d. Kerjasama Pendidikan dan Auxiliary Business

e. Pendapatan Investasi dan Portopolio

f. Jasa Perbankan (*Interest*)

g. Penerimaan SKD (Satuan Kekayaan dan Dana)

h. Penerimaan SUK (Satuan Usaha Komensial)

Perbandingan jumlah pendapatan dan alokasi pemanfaatan dana ITB untuk 3 (tiga) tahun terakhir disajikan pada Tabel 6-1 (a) dan Tabel 6-1 (b).

Tabel 6-1 (a) Sumber Pendapatan ITB*)

Sumber dana	**Tahun**		
	2004	**2005**	**2006**
DIPA	21,8%	16,7%	19,0%
Dana Masyarakat	78,2%	83,3%	81,0%
Total	***100,0%***	***100,0%***	***100,0%***

*) Sumber: Laporan Keuangan ITB

Tabel 6-1 (b) Porsi Sumber Pendapatan dari Dana Masyarakat*)

Dana Masyarakat	**Tahun**		
	2004	**2005**	**2006**
a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)	35,7%	24,5%	41,5%
b. Sumbangan Beasiswa	0,6%	1,1%	0,7%
c. Penelitian & Pengabdian Masyarakat	53,7%	35,0%	40,7%
d. Kerma Pendidikan dan *Auxiliary Business*	0,0%	0,0%	0,0%
e. Pendapatan Investasi dan Portopolio	2,3%	3,9%	5,7%
f. Jasa Perbankan (Interest)	1,0%	1,5%	2,9%
g. Donasi Murni	0,6%	0,3%	0,4%

h. Pendapatan Lain-lain (*Other Income*)	4,3%	3,8%	6,4%
i. Penerimaan SUK	1,6%	1,1%	0,7%

*) Sumber: Laporan Keuangan ITB

6.2. Alokasi Dana Pengembangan Program Akademik

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi ITB 2010, kebijakan umum pengembangan ITB 2001-2006 adalah

1. Melaksanakan pendidikan dam mengembangkan inovasi dalam pendidikan terutama dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Selain mengembangkan *academic science*, ITB juga harus mengembangkan *corporate science* sehingga para dosen dan mahasiswa mampu berusaha, bekerjasama dan berkompetisi dengan baik. Lulusan diharapkan bukan saja dapat menjadi profesional yang handal dan dipercaya, tetapi juga pemimpin yang adil, pengusaha yang jujur dan bermartabat, dan pendidik yang ilmunya mumpuni dan cendekia.

2. Melaksanakan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk membangun kekuatan perekonomian nasional. ITB harus menghasilkan *technopreneur* yang mampu mengembangkan industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan industri-industri maju dunia.

3. ITB perlu melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang-bidang yang prospektif dan bersifat universal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

4. ITB ikut memberdayakan institusi-institusi strategis nasional dan ikut dalam menata kehidupan baru bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat madani yang sejahtera.

Alokasi dana untuk pengembangan program akademik dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Pendidikan,

2. Penelitian & Pemberdayaan Masyarakat,

3. Pendukung Kegiatan Akademik,

4. Pelayanan Kepada Mahasiswa dan Beasiswa,

5. Biaya Transformasi Program Akademik.

Sedangkan program non-akademik meliputi:

1. Operasi dan Pemeliharaan,
2. Administrasi dan Umum,
3. Kemitraan (Auxiliary Business,
4. Beban SKD (Penyaluran Donasi),
5. Beban SUK,
6. Biaya Transformasi Program Non-Akademik.

Perbandingan alokasi pemanfaatan dana ITB untuk 3 (tiga) tahun terakhir diberikan pada Tabel 6-2.

Tabel 6-2 (a) Alokasi Pemanfaatan Dana ITB*)

Alokasi untuk	**Tahun**		
	2004	**2005**	**2006**
Program Akademik	77,7%	60,8	82,8
Program Non-Akademik	22,3	39,2	17,2
Total	***100,0%***	***100,0%***	***100,0%***

*) Sumber: Laporan Keuangan ITB

Tabel 6-2 (b) Alokasi Pemanfaatan Dana untuk Program Akademik*)

Program Akademik	**Tahun**		
	2004	**2005**	**2006**
a .Pendidikan	39,8%	43,4%	51,1%
b. Penelitian & Pemberdayaan Masyarakat	50,4%	47,5%	41,7%
c. Pendukung Kegiatan Akademik	1,2%	2,4%	1,4%
d. Pelayanan Kepada Mahasiswa	1,1%	1,2%	1,2%
e. Beasiswa	7,5%	5,5%	4,6%
f. Biaya Transformasi Program Akademik	0,0%	0,0%	0,0%

*) Sumber: Laporan Keuangan ITB

Tabel 6-2 (c) Alokasi Pemanfaatan Dana untuk Program Non-Akademik*)

Program Akademik	Tahun		
	2004	2005	2006
a. Operasi dan Pemeliharaan	24,4%	10,5%	18,2%
b. Administrasi dan Umum	72,0%	19,9%	79,3%
c. Kemitraan (Auxiliary Business)	3,5%	2,4%	1,5%
d. Beban SKD (Penyaluran Donasi)	0,0%	0,1%	1,0%
e. Beban SUK	0,0%	67,0%	0,0%
f. Biaya Transformasi Program Non-Akademik	0,0%	0,0%	0,0%

*) Sumber: Laporan Keuangan ITB

6.3. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Tantangan ITB kini dan di masa mendatang telah menuntut untuk dipenuhinya kondisi manajemen yang profesional yang dilengkapi dengan sistem kendali internal yang dapat diandalkan di semua tingkat dan entitas institut. Untuk memperkuat kinerja organisasi institut, maka manajemen ITB perlu membangun dan memiliki sistem kendali internal untuk:

1. Menjaga agar ITB dapat berjalan menuju sasaran akademik dan finansial,
2. Membantu manajemen ITB dalam memenuhi misinya,
3. Meminimalkan risiko dan timbulnya keterkejutan (*shock and unwelcome*)
4. Memungkinkan ITB untuk menangani secara cepat setiap perubahan yang harus dilakukan.

Kendali internal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan sasaran ITB melalui upaya/hal-hal berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.
2. Keandalan dan integritas informasi.
3. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Pengamanan aset.

Untuk dapat dipenuhinya kondisi *clean and good governance*, maka pengendalian internal mutlak harus dilakukan untuk memberikan keyakinan pada setiap tahapan pencapaian tujuan efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di ITB dilakukan oleh 2 (dua) satuan instansi, yaitu SPM dan SPI (lihat Standar Tata Pamong untuk penjelasan lebih lengkap tentang SPM dan SPI). Namun khusus untuk masalah pendanaan monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan oleh SPI.

SPI bertanggungjawab dalam memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan konsultansi dengan ruang lingkup tugas dan informasi aktivitas yang di-*review*-nya. Tanggungjawab tersebut meliputi juga koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal (Itjen, BPKP, BPK, KAP, KPK). Tugas SPI dilakukan melalui penilaian independen dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Audit*) pada mutu kendali internal dan proses administratif dari manajemen serta pemberian rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan.

6.4. Mekanisme Penetapan Biaya Pendidikan

Besaran biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) Program Sarjana terdiri atas BPP Pokok, BPP Tambahan, dan Sumbangan Dana Pengembangan Akademik (SDPA). Mekanisme penetapan biaya pendidikan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh ITB sesuai dengan status, kewenangan dan tanggung-jawabnya sebagai suatu institusi BHMN. Mekanisme penentuan biaya pendidikan Program Sarjana ditetapkan oleh Keputusan Rektor ITB berdasarkan perhitungan penerimaan/ pemasukan dan pengeluaran ITB dan kebijakan ITB yang diusulkan kepada MWA untuk disahkan. BPP Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) diatur secara terpisah. Selanjutnya MWA akan mensahkan Biaya pendidikan Program Sarjana melalui Keputusan tentang kebijakan umum penerimaan mahasiswa baru dan kontribusi mahasiswa dalam biaya pendidikan untuk tahun berjalan.

ITB menjamin mahasiswa tidak membayar lebih dari kualitas pendidikan yang diterimanya. Mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik tinggi tetapi kurang beruntung dalam hal ekonomi, tetap dapat mengikuti pendidikan di ITB melalui pemberian biaya pendidikan dan bantuan hidup. Pada tahun 2006, Lembaga Kemahasiswaan mengelola dana beasiswa sejumlah Rp. 9.3 M yang diberikan kepada 5.164 orang mahasiswa dari sejumlah total 16.374 mahasiswa.

6.5. Dukungan Dana Untuk Program Akademik

Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Rencana Strategis ITB 2006-2010, untuk periode 2006-2010, arah pengembangan ITB adalah mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki menuju universitas riset, dengan sasaran untuk bidang sumber dana adalah:

1. Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk berkembang,

2. Memperbesar kemampuan pendanaan dengan penganeka-ragaman sumber pendanaan.

Status otonom memberikan fleksibilitas dan memungkinkan ITB untuk meningkatkan pendapatannya dari Rp. 250 M pada tahun 2001 menjadi Rp. 450 M pada tahun 2006. Peningkatan anggaran yang disampaikan di atas telah memungkinkan ITB melaksanakan program inovatif berbasis insentif untuk mempercepat transformasi ITB menjadi suatu perguruan tinggi yang berfungsi sepenuhnya sebagai badan hukum. Berbagai program penganeka-ragaman sumber pendanaan telah dibuat dan terus diupayakan oleh ITB baik melalui SKD maupun melalui SUK.

Upaya sosialisasi Dana Lestari ITB dan budaya *philantropy* di kalangan alumni ITB dan masyarakat menjadi tema kampanye Dana Lestari ITB antara lain melalui Program Kampanye Cinta ITB. Selain itu juga dikembangkan program-program yang bersifat insindental untuk *fundraising* Dana Lestari ITB. Program lain yang telah dijalankan adalah pembentukan *Selling Agent* Reksa Dana ITB-Niaga.

Sampai dengan bulan Desember 2006, Dana Lestari ITB telah mencapai Rp. 10,22 M dengan hasil investasi sebesar Rp. 2,86 M. Dibandingkan dengan awal tahun 2006, Dana Lestari ITB telah tumbuh sebesar 28,4% dengan hasil investasi sebesar 27,79%. Secara kualitas pertumbuhan Dana Lestari telah menunjukkan perkembangan di atas inflasi. Hasil investasi Dana Lestari juga di atas rata-rata SBI 1 bulan dan SBI 3 bulan (rata-rata bunga deposito maksimal).

SUK didirikan berdasarkan SK Rektor ITB-BHMN Nomor 118/SK/K01/OT/2004 tanggal 14 Juli 2004 dan Surat Keputusan MWA ITB Nomor 004/SK/K01-MWA/2004 tanggal 28 September 2004. Pendirian SUK merupakan perwujudan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Kedudukan SUK selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ITB Bab XII Pasal 130-138 yang telah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Nomor 006/SK/K01-MWA/2005.

SUK dikelola oleh Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial (BPSUK). Pimpinan BKSUK terdiri dari Ketua berdasarkan SK Rektor Nomor 282/SK/K01/KP/2005 tanggal 22 Desember 2005 serta Wakil Ketua dan Sekretaris berdasarkan atas SK Rektor Nomor 010/SK/K01/KP/2005 tanggal 13 Januari 2006.

Pada tahun 2006 BPSUK mengelola 9 (sembilan) Unit-unit Usaha Komersial (UUK) dengan 6 (enam) diantaranya merupakan UUK yang kepemilikannya di atas 50%. MWA masih terus melakukan perubahan dalam struktur SUK untuk mendapatkan struktur yang paling optimal.

Berdasarkan Tabel 6-1 Sumber Pendapatan ITB di atas, dapat dilihat bahwa ITB telah menunjukkan kemampuannya untuk memperoleh dukungan dana dari masyarakat sebesar rata-rata 80% untuk 3 (tiga) tahun terakhir.

6.6 Kesimpulan

1. Penggalangan dana yang diusahakan oleh ITB telah mengacu pada visi dan misi perguruan tinggi yang diterjemahkan ke dalam Renstra Institut untuk menjamin keandalan dari sumber-sumber dananya.

2. ITB memiliki proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan program akademik rata-rata sebesar 74% dalam tiga tahun terakhir.

3. ITB telah mengikuti proses audit laporan keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor yang berkompeten (akuntan publik) serta proses monitoring dan evaluasi pendanaan secara internal yang dilakukan oleh SPI.

4. Penetapan biaya pendidikan dilakukan melalui suatu mekanisme yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan terkait melalui Keputusan Rektor dan Keputusan MWA.

5. Berdasarkan sumber pendanaan dan alokasi pemanfaatan dana, ITB telah mampu memperoleh dukungan dana dari masyarakat sebesar rata-rata 80% untuk 3 (tiga) tahun terakhir.